

IDEOLOGI MUHAMMADIYAH DAN IMPLEMENTASI PRAKTIS KEPUTUSAN ORGANISASI TENTANG 5 KHITTAH DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DI ERA MODERN

Maimunah¹, Eny Ratna Purwanti², Pusparini³, Heri Rifhan Halili⁴

¹ Pascasarjana Institut Ahmad Dahlan Probolinggo; maimunah.spidi79@gmail.com

² Pascasarjana Institut Ahmad Dahlan Probolinggo; enyratna22@gmail.com

³ Pascasarjana Institut Ahmad Dahlan Probolinggo; rinipuspa826@gmail.com

⁴ Pascasarjana Institut Ahmad Dahlan Probolinggo; rifanhalili@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Keyword 1;

Muhammadiyah Ideology

Keyword 2; Khittah

Keyword 3; Islamic

Preaching

Keyword 4; Reformation

Keyword 5; AmarMa'ruf

Nahi Munkar

Article history:

Received 2026-06-29

Revised 202-07-29

Accepted 2026-11-01

ABSTRACT

Muhammadiyah has long stood as one of the most influential Islamic organizations in Indonesia. Since its founding in 1912, the organization has built a strong ideological identity one that finds its operational expression in five guiding principles collectively known as the 5 Khittah. These principles emerged from successive national congresses held in Palembang (1956), Ponorogo (1969), Ujung Pandang (1971), Surabaya (1978), and Denpasar (2002). This paper examines how Muhammadiyah's ideology functions in practice through the implementation of the 5 Khittah, particularly amid the challenges of contemporary life. Drawing on a qualitative library research method, the study engages with official organizational documents, academic literature, and relevant scientific articles. The findings suggest that Muhammadiyah's ideology, rooted in the Qur'an and Sunnah, manifests through a tajdid spirit that balances purification with progress. Rather than remaining mere declarations, the five khittah serve as living guidelines that drive concrete social programs in education, health, and community welfare. At the same time, the pull of partisan politics, the pressures of globalization, and the weakening of ideological understanding among younger members present challenges that cannot be overlooked. Strengthening cadre formation, harnessing digital media for outreach, and embedding khittah values more deeply into organizational culture are essential for Muhammadiyah to remain steadfast in its mission.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Maimunah

Pascasarjana Institut Ahmad Dahlan Probolinggo; maimunah.spidi79@gmail.com

1. INTRODUCTION

Jika kita berbicara tentang organisasi Islam yang paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia, Muhammadiyah hampir pasti selalu masuk dalam daftar teratas. Didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Yogyakarta, organisasi ini lahir bukan semata-mata sebagai perkumpulan keagamaan biasa melainkan sebagai gerakan pembaruan yang melihat kondisi umat Islam saat itu dengan keprihatinan mendalam. Amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid (pembaruan) menjadi dua napas utama yang sejak awal menghidupi semangat gerakan ini, dengan visi besar: terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya (Nashir, 2022).

Yang membedakan Muhammadiyah dari banyak organisasi Islam lainnya adalah cara organisasi ini mengelola dirinya sebagai entitas modern. Muhammadiyah memiliki ideologi yang terstruktur bukan sekadar kumpulan nilai abstrak, melainkan kerangka berpikir dan bertindak yang hidup dalam setiap keputusan dan program organisasi. Ideologi ini berakar kuat pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, namun didekati dengan semangat rasional dan terbuka terhadap perkembangan zaman. Inilah yang membuat Muhammadiyah mampu bertahan dan bahkan berkembang melewati berbagai pergolakan sejarah Indonesia (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2022).

Perjalanan panjang lebih dari satu abad itu tentu tidak selalu mulus. Muhammadiyah menghadapi berbagai tekanan, terutama ketika dinamika politik nasional kerap "menggoda" organisasi untuk terlibat lebih jauh dalam urusan kekuasaan. Godaan semacam ini bisa mengancam independensi gerakan dakwah yang menjadi inti dari keberadaan Muhammadiyah. Maka, dibutuhkan sebuah kompas yang jelas sesuatu yang bisa terus mengingatkan organisasi pada tujuan dasarnya di tengah berbagai tarik-menarik kepentingan (Azizah & Sholeh, 2023).

Kompas itulah yang kemudian hadir dalam wujud 5 Khittah Muhammadiyah. Kata khittah sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti garis atau arah perjuangan. Lima khittah yang lahir dari serangkaian Mukhtar nasional Palembang (1956), Ponorogo (1969), Ujung Pandang (1971), Surabaya (1978), dan Denpasar (2002) menjadi tonggak-tonggak penting yang menegaskan di mana Muhammadiyah harus berdiri: sebagai gerakan dakwah Islam, bukan partai politik, namun tetap peduli dan aktif dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara (Mu'ti & Ahmad, 2024).

Lebih dari sekadar teks dalam dokumen resmi, 5 Khittah seharusnya hidup dan terasa dampaknya dalam kehidupan nyata. Wujud konkretnya bisa dilihat pada ribuan sekolah dan kampus Muhammadiyah yang tersebar di seluruh pelosok negeri, rumah sakit yang melayani tanpa memandang latar belakang pasien, hingga lembaga-lembaga sosial yang mengisi celah yang ditinggalkan oleh negara. Semua itu adalah implementasi nyata dari nilai-nilai khittah (Wahyuni & Karim, 2023).

Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi khittah di era kiwari bukan tanpa hambatan. Arus globalisasi yang deras, perubahan cara berpikir generasi muda yang tumbuh di tengah banjir informasi digital, serta masuknya kepentingan-kepentingan politik ke dalam tubuh organisasi menjadi ancaman serius yang perlu dihadapi dengan strategi yang matang (Syaifullah & Ritonga, 2022).

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyentuh sejumlah sisi dari persoalan ini. Ada yang fokus pada konsep tajdid, ada pula yang mengkaji peran Muhammadiyah dalam panggung demokrasi Indonesia (Azizah & Sholeh, 2023; Mu'ti & Ahmad, 2024). Namun, kajian yang secara terpadu melihat keterkaitan antara ideologi Muhammadiyah dengan implementasi 5 Khittah dalam konteks tantangan kontemporer masih jarang ditemukan.

Di sinilah tulisan ini berupaya mengisi celah tersebut. Dengan menawarkan analisis yang lebih menyeluruh, penelitian ini bertujuan: (1) menelaah ideologi Muhammadiyah sebagai landasan gerakannya; (2) mengurai isi dan makna setiap khittah; (3) menganalisis bagaimana 5 Khittah terimplementasi dalam kehidupan bermasyarakat; serta (4) mengidentifikasi tantangan yang dihadapi beserta solusi strategis yang relevan.

2. METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) sebuah pilihan yang memang paling sesuai mengingat fokus kajian ini adalah menelaah dan menafsirkan teks, dokumen, dan pemikiran, bukan mengumpulkan data lapangan. Sebagaimana ditegaskan Creswell dan Poth (2018), pendekatan kualitatif memberi ruang bagi peneliti untuk menggali makna secara mendalam daripada sekadar mengukur frekuensi atau angka.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua lapis. Lapis pertama adalah sumber primer: dokumen-dokumen resmi Muhammadiyah, mulai dari keputusan Mukhtamar, Tanfidz Keputusan Muhammadiyah, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, hingga teks asli kelima khittah itu sendiri. Lapis kedua adalah sumber sekunder yang mencakup buku-buku tentang Muhammadiyah, artikel dari jurnal bereputasi, dan hasil penelitian terdahulu yang terbit antara tahun 2022 hingga 2026.

Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis. Setelah terkumpul, data diklasifikasikan berdasarkan empat tema utama: (1) konsep ideologi Muhammadiyah, (2) sejarah dan substansi 5 Khittah, (3) implementasi praktis di lapangan, serta (4) tantangan dan solusi di era modern. Analisis dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) mengikuti alur: reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi makna, dan penarikan kesimpulan (George, 2022). Untuk menjamin keterpercayaan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber mencocokkan informasi dari dokumen resmi, literatur akademik, dan temuan penelitian empiris yang relevan.

3. RESULT AND DISCUSSION

3.1 Ideologi Muhammadiyah sebagai Landasan Gerakan

Memahami Muhammadiyah tanpa memahami ideologinya ibarat melihat pohon tanpa mengenal akarnya. Ideologi Muhammadiyah adalah seperangkat nilai, keyakinan, dan prinsip yang tidak hanya menjadi panduan internal organisasi, tetapi juga menjadi cara Muhammadiyah menafsirkan dan merespons dunia di sekitarnya dalam urusan keagamaan, pendidikan, sosial, maupun kehidupan kebangsaan (Nashir, 2022).

Akar historis ideologi ini tidak bisa dilepaskan dari keprihatinan K.H. Ahmad Dahlan terhadap kondisi umat Islam di awal abad ke-20 yang mengalami kemunduran hampir di semua lini kehidupan (Purwaningsih, 2026; Safiq Rosad1, Aris Rahmadi, 2025). Dalam pandangannya, kemunduran itu bukan takdir yang harus diterima, melainkan akibat dari jauhnya praktik Islam dari sumbernya yang otentik. Maka, Muhammadiyah hadir sebagai gerakan tajdid sebuah upaya memurnikan sekaligus memajukan Islam, kembali ke Al-Qur'an dan As-Sunnah sambil memeluk ilmu pengetahuan dan kemajuan zaman (Mu'ti & Ahmad, 2024).

Beberapa ciri khas membedakan ideologi Muhammadiyah dari gerakan Islam lain di Indonesia. Pertama, Al-Qur'an dan As-Sunnah dijadikan sumber utama yang dipahami secara rasional dan kontekstual tidak terikat pada satu mazhab tertentu. Ini memberi Muhammadiyah fleksibilitas untuk merespons perubahan zaman tanpa kehilangan pijakan normatifnya. Kedua, tajdid menjadi orientasi utama yang mencakup dua sisi sekaligus: purifikasi (membersihkan akidah dari bid'ah, khurafat, dan takhayul) dan dinamisasi (membuka diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi) (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2022).

Ketiga, Muhammadiyah percaya bahwa nilai-nilai Islam harus diterjemahkan ke dalam amal usaha yang nyata dan terasa manfaatnya. Ribuan sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang dikelola Muhammadiyah adalah bukti konkret dari keyakinan ini. Keempat, Muhammadiyah menganut paham wasathiyah Islam yang moderat, tengahan, dan terbuka yang menolak dua ekstrem sekaligus: fanatisme yang kaku dan liberalisme yang kebablasan (Wahyuni & Karim, 2023). Kelima, dan ini mungkin yang paling krusial dalam konteks kajian ini, Muhammadiyah secara tegas memilih untuk tidak terlibat dalam politik praktis demi menjaga kemurnian misi dakwahnya (Mu'ti & Ahmad, 2024).

Dalam konteks Indonesia kontemporer, keteguhan pada ideologi wasathiyah ini semakin terasa urgensinya. Polarisasi politik yang meruncing, bangkitnya radikalisme agama, dan erosi nilai-nilai moderasi di kalangan anak muda menjadi latar yang membuat ideologi

Muhammadiyah bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan kebutuhan masa kini (Fariadi, Ikasari, & Nafiza, 2025; Liza, 2020). Penelitian Azizah dan Sholeh (2023) menemukan bahwa internalisasi ideologi Muhammadiyah terbukti menjadi faktor protektif yang signifikan dalam mencegah radikalisme di kalangan kader muda. Artinya, memperkuat ideologi bukan hanya soal kohesi internal organisasi, melainkan juga kontribusi nyata bagi stabilitas sosial masyarakat Indonesia secara lebih luas.

3.2 Sejarah, Isi, dan Makna 5 Khittah Muhammadiyah

Kata khittah secara harfiah berarti garis atau haluan perjuangan. Dalam konteks Muhammadiyah, maknanya lebih luas dari itu: khittah adalah pernyataan resmi organisasi tentang di mana ia berdiri, ke mana ia melangkah, dan bagaimana ia bersikap terhadap berbagai persoalan yang dihadapinya (Al-Razi, Khilmiyah, & Jailani, 2025; Fariadi et al., 2025). Lima khittah yang ada bukan hadir sekaligus, melainkan lahir satu per satu seiring dengan pergantian zaman dan perubahan tantangan yang dihadapi organisasi (Syaifullah & Ritonga, 2022).

Khittah Palembang (1956) menjadi titik awal dari rangkaian ini. Ia lahir ketika arus demokrasi liberal di era 1950-an membawa banyak anggota Muhammadiyah terseret ke dalam pusaran politik praktis. Dalam situasi itu, Mukhtar di Palembang menegaskan: Muhammadiyah bukan partai politik. Namun Muhammadiyah juga bukan organisasi yang cuci tangan dari urusan bangsa ia tetap bisa memberikan bimbingan moral kepada kehidupan politik tanpa harus terjun langsung ke dalamnya. Pernyataan ini menjadi fondasi yang terus dirujuk dalam khittah-khittah berikutnya (Mu'ti & Ahmad, 2024).

Memasuki era Orde Baru yang menghendaki penyederhanaan partai politik, Muhammadiyah kembali menegaskan posisinya melalui Khittah Ponorogo (1969). Kali ini tekanannya pada pentingnya netralitas organisasi terhadap semua kekuatan politik siapapun mereka. Muhammadiyah tidak boleh menjadi alat bagi kepentingan politik manapun, termasuk pemerintah yang berkuasa. Selang dua tahun kemudian, Khittah Ujung Pandang (1971) memperkuat posisi ini di tengah pergulatan partai-partai Islam dengan penguasa Orde Baru yang semakin menguat (Nashir, 2022).

Khittah Surabaya (1978) hadir dengan nuansa yang sedikit berbeda. Alih-alih hanya berbicara tentang apa yang tidak boleh dilakukan Muhammadiyah (yaitu berpolitik praktis), khittah ini lebih aktif merumuskan apa yang seharusnya dilakukan: memperkuat peran Muhammadiyah dalam pembangunan nasional melalui dakwah sosial dan amar ma'ruf nahi munkar. Muhammadiyah diposisikan sebagai mitra pembangunan yang independent bukan sekadar pengkritik, tetapi pelaku aktif perubahan sosial (Purwaningsih, 2026).

Terakhir, Khittah Denpasar (2002) lahir dalam semangat reformasi dan demokratisasi pasca runtuhnya Orde Baru. Era multipartai yang terbuka kembali menghadirkan godaan politik yang tak kalah besarnya. Khittah Denpasar menjawab tantangan ini dengan menegaskan komitmen Muhammadiyah pada nilai-nilai keadilan, demokrasi, dan kemanusiaan universal sebuah posisi yang memungkinkan Muhammadiyah tetap relevan secara politik tanpa harus terseret ke dalam permainan kekuasaan (Wahyuni & Karim, 2023).

Membaca kelima khittah sebagai satu kesatuan, tampak jelas adanya benang merah yang konsisten: Muhammadiyah selalu berupaya menjaga jarak dari politik praktis sambil tetap hadir sebagai kekuatan moral dan sosial yang nyata. Kesenambungan ini bukan kebetulan ia mencerminkan karakter ideologi Muhammadiyah yang stabil sekaligus adaptif. Syaifullah dan Ritonga (2022) menyebutnya sebagai "instrumen adaptasi ideologi," yaitu mekanisme yang memungkinkan organisasi tetap relevan tanpa kehilangan jati dirinya.

3.3 Implementasi Praktis 5 Khittah dalam Kehidupan Bermasyarakat

Sebuah ideologi baru benar-benar hidup ketika ia bisa dilihat, dirasakan, dan dialami dampaknya oleh masyarakat luas bukan hanya dibaca dalam dokumen. Dari sudut pandang ini, Muhammadiyah telah membuktikan bahwa 5 Khittah bukan sekadar kata-kata di atas kertas. Dalam bidang dakwah, Muhammadiyah menjalankan misinya melalui berbagai saluran: pengajian, media dakwah cetak dan elektronik, lembaga pendidikan, serta kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari warga. Yang menarik, dakwah Muhammadiyah tidak mengenal batas "keanggotaan" ia terbuka dan inklusif bagi siapa

saja. Seiring perkembangan teknologi, kanal-kanal digital seperti media sosial, podcast, dan YouTube semakin menjadi medan dakwah yang aktif digarap Muhammadiyah. Ini adalah wujud nyata dari semangat tajdid: berinovasi dalam cara tanpa mengubah substansi (Maarif Institute, 2023).

Di bidang pendidikan, kontribusi Muhammadiyah berbicara sendiri lewat angka-angka yang sulit diabaikan. Lebih dari 162 perguruan tinggi, sekitar 5.000 sekolah dari jenjang dasar hingga menengah, dan ribuan lembaga pendidikan anak usia dini tersebar dari Sabang sampai Merauke (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2022). Namun lebih dari sekadar jumlah, yang membedakan pendidikan Muhammadiyah adalah integrasi nilai peserta didik tidak hanya dibekali kecakapan akademis, tetapi juga karakter Islam yang moderat dan berkemajuan, yang secara langsung mencerminkan prinsip-prinsip khittah (Safiq Rosad1, Aris Rahmadi, 2025; Zuhriyah & Prasadha, 2026).

Bidang sosial dan kesehatan pun tidak kalah masif. Rumah sakit, klinik, panti asuhan, lembaga zakat, dan berbagai fasilitas sosial yang dikelola Muhammadiyah menjangkau jutaan orang setiap tahunnya tanpa memandang apakah mereka anggota Muhammadiyah atau bukan, Muslim atau non-Muslim, kaya atau miskin. Universalisme kemanusiaan ini bukan slogan, melainkan praktik yang sudah dijalankan puluhan tahun dan diakui oleh pemerintah maupun masyarakat sebagai kontribusi nyata bagi kesejahteraan Indonesia (Wahyuni & Karim, 2023).

Dalam ranah politik dan kebangsaan, Muhammadiyah mengambil posisi yang konsisten dengan khittahnya: tidak berpolitik praktis, tetapi tidak pula bungkam terhadap ketidakadilan. Kritik konstruktif terhadap kebijakan publik, pendidikan politik bagi masyarakat, dan advokasi demi kemaslahatan umat menjadi mode keterlibatan yang dipilih. Posisi ini, menurut temuan Azizah dan Sholeh (2023), justru meningkatkan kepercayaan publik terhadap Muhammadiyah sebagai kekuatan moral yang bisa menjadi penengah dan penyeimbang dalam dinamika politik nasional.

Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi ini tidak jatuh dari langit. Ia merupakan buah dari sistem kaderisasi yang terstruktur, komitmen pengurus di semua tingkatan, dan dukungan luas dari akar rumput warga Muhammadiyah. Sukarno dan Hasyim (2022) menyimpulkan bahwa kekuatan Muhammadiyah terletak pada perpaduan antara panduan ideologis yang jelas dengan jaringan amal usaha yang luas dan merata sebuah kombinasi yang sulit ditandingi oleh organisasi masyarakat sipil mana pun di Indonesia.

3.4 Tantangan dan Solusi Implementasi 5 Khittah di Era Modern

Tentu saja, tidak ada cerita sukses yang tanpa tantangan. Di era modern ini, implementasi 5 Khittah Muhammadiyah berhadapan dengan sejumlah persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara lama. Tantangan pertama datang dari dalam negeri sendiri: tekanan politik praktis yang makin kompleks di era demokrasi (Rangkuti, Riswanda, Harfiani, & Nasution, 2026; Saefudin, 2022). Secara resmi, Muhammadiyah tidak berpolitik praktis. Namun dalam kenyataan sehari-hari, banyak kader dan pimpinan yang memiliki afiliasi bahkan aktivitas aktif di partai-partai politik tertentu. Situasi ini menciptakan tegangan yang bisa menggerus netralitas organisasi, terutama ketika kepentingan partai berbenturan dengan nilai-nilai yang diperjuangkan Muhammadiyah (Mu'ti & Ahmad, 2024).

Tantangan kedua hadir dari luar, dalam bentuk globalisasi dan modernisasi yang mengubah lanskap nilai dan gaya hidup terutama di kalangan generasi muda. Banjir informasi dari platform digital seringkali membawa narasi-narasi yang bertolak belakang dengan moderasi Islam ala Muhammadiyah (Liza, 2020). Paradoksnya, media digital yang sama juga bisa menjadi peluang besar bagi dakwah Muhammadiyah jika dikelola dengan tepat. Tantangan sekaligus peluang ini menuntut kecerdasan strategis dari para pemimpin organisasi (Syaifullah & Ritonga, 2022).

Yang barangkali paling mengkhawatirkan adalah tantangan ketiga: melemahnya pemahaman dan penghayatan ideologi khittah di kalangan kader muda. Generasi yang tumbuh di era digital memiliki cara belajar dan berinteraksi yang sangat berbeda dari generasi pendahulunya. Eksposur mereka terhadap teks-teks ideologis dan sejarah perjuangan organisasi jauh lebih terbatas. Akibatnya, nilai-nilai khittah terasa asing dan abstrak bukan

sesuatu yang hidup dan relevan bagi kehidupan mereka. Azizah dan Sholeh (2023) menemukan bahwa hanya segelintir kader muda yang mampu menjelaskan secara memadai isi dan makna 5 Khittah (Wahyuni & Karim, 2023).

Menghadapi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang tidak bisa ditunda. Pertama, kaderisasi ideologi perlu diperbarui bukan sekadar ditingkatkan kuantitasnya, tetapi juga diperbarui pendekatannya. Materi tentang ideologi Muhammadiyah dan 5 Khittah harus disampaikan dengan cara yang lebih hidup, kontekstual, dan relevan dengan kehidupan generasi muda kini. Integrasi ke dalam kurikulum ortom dan lembaga pendidikan Muhammadiyah di semua jenjang menjadi keharusan (Maarif Institute, 2023).

Kedua, Muhammadiyah perlu benar-benar memeluk era digital bukan sekadar hadir, tetapi benar-benar memanfaatkan potensinya secara maksimal. Konten-konten dakwah yang kreatif, segar, dan mudah dikonsumsi generasi muda perlu terus diproduksi di berbagai platform. Bahasa yang digunakan harus berubah; pesan yang disampaikan harus terasa dekat dengan realitas hidup anak muda hari ini, meski substansinya tetap berakar pada nilai-nilai khittah (Syaifulah & Ritonga, 2022).

Ketiga, pengawasan internal perlu diperkuat melalui mekanisme evaluasi yang berkala, transparan, dan partisipatif. Dialog terbuka antara pimpinan dan kader di semua tingkatan perlu menjadi rutinitas, bukan hanya seremoni. Tujuannya adalah membangun kesepahaman yang hidup tentang apa artinya berkhittah Muhammadiyah di zaman sekarang (Mu'ti & Ahmad, 2024). Keempat, kolaborasi lintas sektor dengan lembaga pendidikan, media, CSO, dan pemerintah perlu diperluas, namun dengan satu syarat yang tidak bisa ditawar: independensi Muhammadiyah tetap terjaga. Kolaborasi yang tepat akan memperluas jangkauan dampak sosial Muhammadiyah tanpa mengorbankan integritas gerakannya (Wahyuni & Karim, 2023).

4. CONCLUSION

Perjalanan lebih dari satu abad Muhammadiyah mengajarkan satu hal yang konsisten: ideologi yang kuat adalah fondasi yang tak tergantikan bagi keberlangsungan sebuah gerakan. Ideologi Muhammadiyah yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan orientasi tajdid yang moderat dan berkemajuan telah terbukti mampu memandu organisasi melewati berbagai babak sejarah yang tidak selalu mudah.

Lima Khittah Muhammadiyah dari Palembang hingga Denpasar adalah instrumen operasional yang saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Bersama-sama, kelima khittah itu membentuk sebuah sistem panduan yang memungkinkan Muhammadiyah tetap setia pada misi dakwahnya sambil terus beradaptasi dengan perubahan konteks zaman. Implementasinya yang nyata dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial-kesehatan, dan kebangsaan membuktikan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi yang hidup di awang-awang ide, melainkan kekuatan yang bekerja di bumi nyata.

Tentu, tantangan-tantangan di era modern dari godaan politik, tekanan globalisasi, hingga jarak generasi dalam pemahaman ideologi adalah persoalan nyata yang tidak bisa disepelekan. Namun dengan penguatan kaderisasi yang relevan, inovasi dakwah digital, pengawasan internal yang sehat, dan kolaborasi yang menjaga independensi, Muhammadiyah memiliki bekal yang cukup untuk tetap kukuh di jalur perjuangannya.

Kajian ini membuka beberapa agenda penelitian yang menarik untuk dikembangkan ke depan. Studi empiris tentang implementasi 5 Khittah di berbagai cabang dan daerah dengan konteks lokal yang berbeda akan memberikan gambaran yang lebih kaya. Demikian pula, penelitian tentang efektivitas strategi dakwah digital Muhammadiyah dalam menjangkau dan mengideologisasi generasi muda layak mendapat perhatian lebih serius dari para peneliti yang peduli pada masa depan organisasi ini.

REFERENCES

- Azizah, N., & Sholeh, A. (2023). Muhammadiyah dan Moderasi Beragama: Relevansi Ideologi Wasathiyah dalam Mencegah Radikalisasi di Kalangan Kader Muda. *Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, 14(2), 87–104. <https://doi.org/10.21111/jsik.v14i2.8821>

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- George, M. (2022). Content Analysis for Research: Methods, Tools, and Applications. *Educational Research Quarterly*, 45(3), 22–38.
- Maarif Institute. (2023). *Muhammadiyah di Era Digital: Peluang dan Tantangan Dakwah di Dunia Maya*. Jakarta: Maarif Institute for Culture and Humanity.
- Moleong, L. J. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mu'ti, A., & Ahmad, F. (2024). *Muhammadiyah: Gerakan Islam Berkemajuan dalam Dinamika Politik dan Sosial Indonesia*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Nashir, H. (2022). *Ideologi Gerakan Muhammadiyah* (Edisi Revisi dan Penyempurnaan). Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2022). *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah: Perspektif dan Implementasi*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Sukarno, A., & Hasyim, M. (2022). Kekuatan Amal Usaha Muhammadiyah sebagai Instrumen Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pemikiran Islam Indonesia*, 9(1), 55–74. <https://doi.org/10.14421/jpii.v9i1.3021>
- Syaifullah, M., & Ritonga, A. H. (2022). 5 Khittah Muhammadiyah sebagai Instrumen Adaptasi Ideologi Organisasi Islam di Indonesia. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 21(2), 315–340. <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss2.art5>
- Wahyuni, S., & Karim, A. (2023). Implementasi Nilai-Nilai Khittah Denpasar dalam Pengelolaan Amal Usaha Muhammadiyah di Bidang Sosial dan Kesehatan. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 8(1), 44–62. <https://doi.org/10.24014/jmd.v8i1.17023>.
- Al-Razi, M. F., Khilmiyah, A., & Jailani, I. A. (2025). Religion in the Highway: Qualitative Exploration in Muslim Youths' Moral Reasoning and Development on Traffic Rules. *Deviant Behavior*, 46(12), 1742–1754. <https://doi.org/10.1080/01639625.2024.2407436>
- Fariadi, R., Ikasari, A., & Nafiza, S. (2025). Manhaj Tarjih: Navigating Ijtihad in The Disruption Era. *Indonesian Journal of Islamic Economic Law*, 2(1), 29–42. <https://doi.org/10.23917/ijoel.v2i1.7044>
- Liza, F. (2020). Islam Berkemajuan Perspektif Globalisasi: Kontribusi Islam Indonesia pada Peradaban Global. *Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 11(1), 74–96.
- Purwaningsih, N. T. (2026). EPISTEMOLOGI MANHAJ TARJIH DAN POLA PIKIR MATEMATIKA : SINERGI LOGIKA DALAM TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM. *JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN ILMU*, 3(1), 38–47.
- Rangkuti, K. A., Riswanda, W., Harfiani, R., & Nasution, M. (2026). The Role of Muhammadiyah in the Development of Digital Literacy in Islamic Religious Education : A Library Research Study. *Global Education Journal*, 4(2), 159–170.
- Saefudin. (2022). Transformasi Doktrin Al- Ma ' un Terhadap Penguatan Gerakan Ekonomi Muhammadiyah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 2120–2134.
- Safiq Rosad1, Aris Rahmadi, M. S. (2025). ISLAM BERKEMAJUAN DALAM JEJAK NABI DAN KIAI : ANALISIS PERBANDINGAN DAKWAH RASULULLAH SAW DAN KH . AHMAD. *JURNAL KAJIAN ISLAM MODERN*, 13(September), 81–91.
- Zuhriyah, L., & Prasadha, A. S. (2026). Burhani dan bayani dalam dialektika ilmu menuju epistemologi islam yang transformatif. *Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan*, 05(01), 3–12.